



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Tahun 2023

DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH
TAHUN 2023

Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih
Jl. Jendral Sudirman Km. 12 Sindur Kec. Cambai Prabumulih 31143
Telp. (0713) 3920011 Fax (0713) 3920019



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 6 indikator. Selanjutnya sasaran strategis tersebut diwujudkan dalam 4 (empat) Program, 13 (Tiga Belas) kegiatan, dan 35 (Tiga Puluh Lima) sub kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD Tahun 2023. Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan rata-rata mencapai 84,87%. Sedangkan capaian akuntabilitas keuangan di tahun 2023 sebesar 87,89 %. Dengan demikian tugas yang diamanatkan di dalam Rencana Strategis dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga secara ke seluruhan tercapainya target-target pembangunan tadi menggambarkan adanya komitmen yang kuat dari unsur pimpinan maupun staf Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Capaian Nilai SAKIP Tahun 2023 (untuk tahun 2022) yaitu 99,71% (Nilai BB (79,77)). Capaian realisasi ini tidak mencapai dari target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja 2023 namun capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya dari nilai 73,6 menjadi 79,77. Dari hasil evaluasi atas Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2022 tersebut diperoleh nilai sebesar 79,77 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 100,00 atau 79,77 dengan kategori sangat baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 3/ coordinator.
- b. Persentase PPH Ketersediaan Pangan Utama tahun 2023 mencapai sebesar 94,03% dari target sebesar 94% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,03 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan, namun



bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 capaian kinerjanya menurun dari 94,8% menjadi 94,03%.

Perhitungan skor ini menggunakan aplikasi baru berdasarkan konsumsi SUSENAS dan produksi pertanian sedangkan data impor-ekspor sudah berdasarkan perhitungan aplikasi NBM Tahun 2023. Dengan menggunakan skor mutu ideal PPH ketersediaan sebesar 100 maka dapat dikatakan bahwa kualitas pangan yang tersedia di Prabumulih belum memenuhi kaidah gizi yang beragam dan seimbang yang ideal. Hal ini disebabkan kontribusi energi dari masing-masing kelompok pangan masih ada yang kurang, mendekati bahkan ada yang telah melebihi normal ideal PPH ketersediaan. Adapun kelompok pangan yang kontribusinya angka ideal PPH yang direkomendasikan yakni berasal dari kelompok pangan hewani, yaitu pangan hewani, minyak dan lemak dan dari kelompok pangan nabati yaitu sayur-sayuran, sedangkan kelompok bahan pangan yang masih dibawah angka ideal yang direkomendasikan terdiri dari kelompok buah/ biji berminyak, padi-padian, kelompok umbi-umbian, kelompok gula, Kacang Kacangan dan kelompok lain-lain.

- c. Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tahun 2023 adalah sebesar 93,1% yang berarti melebihi dari target direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar 85% sehingga persentase capaian kinerja tahun 2023 adalah 109,52%.

Capaian skoring Angka PPH Konsumsi Pangan Kota Prabumulih masuk ke dalam kategori sangat baik dimana peningkatan skor diatas target capaian perjanjian kinerja. Keberhasilan ini diantaranya dipengaruhi oleh upaya edukasi ke masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman di Tahun 2023 yang cukup gencar dilaksanakan.

- d. **“Cakupan Informasi Stabilitas Harga Pangan”** tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %. Hasil Pemantauan Harga Pangan Pokok (Beras medium) selama 48 minggu selama tahun 2023 dengan koefisien keragaman *Coefisien Variabel* (CV) telah mencapai 8,39% dari target CV <10%. Angka ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga pangan utama yaitu



beras masih dalam kategori stabil. Harga Beras yang diambil yaitu beras medium bukan premium dikarenakan beras medium merupakan beras yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Angka ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga pangan utama yaitu beras masih dalam kategori tidak stabil. Pada umumnya fluktuasi/ lonjakan harga terjadi hanya bersifat sementara yaitu pada hari besar keagamaan dan nasional (HBKN) yaitu Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru. Kenaikan harga biasanya mulai terlihat ketika masyarakat menyambut datangnya bulan suci Ramadhan dan puncaknya menyambut Hari Raya Idul Fitri. Selain HBKN, fluktuasi harga yang terjadi tiap tahun karena adanya pergeseran nilai mata uang dimana harga beberapa komoditi pangan pokok tertentu dipengaruhi oleh perkembangan harga pasar internasional.

- e. Capaian kinerja indikator kedua yaitu “Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 60 Ton dalam 5 (Lima) Tahun” tahun 2023 adalah sebesar 0 Ton dari target sebesar 13 Ton yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 0%.

Kuota Minimum Cadangan Pangan Pemerintah Kota mengacu kepada kepada Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 257/1869/DKPP/2018 yaitu 71,39 Ton untuk Kota Prabumulih. Jumlah Total beras Cadangan Pangan sampai dengan saat ini yaitu sebanyak 48,669 Ton dan telah disalurkan sebanyak 36,405 Ton. Total Cadangan pangan sampai dengan tahun 2023 yang tersimpan di gudang BULOG yaitu 12,264 Ton (20,39%) dari Total Kuota Minimum Kota Prabumulih.

Kegiatan pengadaan cadangan pangan tidak direalisasikan dikarenakan ada kegiatan penyaluran cadangan pangan yang terdapat pada APBD Perubahan Tahun 2023 serta proses pencairannya berada pada pertengahan bulan November dimana menurut surat dari BULOG Kanwil Sumsel Babel Nomor : B-160.06020.03.2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang izin prinsip penjualan beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) tidak dapat melakukan pengadaan sebelum dilakukan penyaluran beras yang telah disimpan/dititipkan di BULOG. Sementara, penyaluran beras tersebut dilaksanakan pada awal bulan



Desember tahun 2023, sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pengadaan cadangan pangan tidak mencukupi waktu dikarenakan telah mencapai batas waktu akhir anggaran tahun 2023.

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya dan langkah-langkah yang dirumuskan sebagai strategi pemecahan masalah yang selama ini ditemui. Tentunya upaya-upaya tersebut akan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kemampuan sumber daya yang dimiliki guna pencapaian kinerja yang lebih tinggi ditahun berikutnya guna mewujudkan visi Walikota Prabumulih “*Kota Prabumulih sebagai Kota Prima dan Berkualitas 2023*”.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena berkat Ridho dan Rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan Sumber Daya dengan didasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang telah di tetapkan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga menugaskan bahwa Ketahanan Pangan sebagai Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2023 merupakan Laporan Hasil Penyelenggaraan Program/Kegiatan Tahun 2023 dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2023 yang sesuai dengan RENSTRA DKP Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 dan RENJA 2023 dengan keberhasilan ini hendaknya dapat menjadi motivasi yang lebih inovatif dan kreatif untuk perbaikan kinerja, sedangkan kegagalan dapat menjadi introspeksi terhadap kebijakan yang timbul sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi penyelenggara kegiatan.

Kami menyadari bahwa dalam penyampaian LKJIP ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harap untuk perbaikan penyempurnaan dalam penyusunan LKJIP yang akan datang.

Prabumulih, 24 Januari 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Prabumulih,



Suranti, SP
Pembina TK.I / IV b
NIP. 19640325 198708 2 001



DAFTAR ISI

	Halaman
Ringkasan Eksekutif.....	i
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Bab I. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3 Isu Strategis.....	11
1.4 Sistematika Pelaporan	12
Bab II. Perencanaan Kinerja	
2.1 Rencana Strategis.....	14
2.2 Rencana Kerja Tahun 2023.....	17
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	33
2.4 Indikator Kinerja Utama	34
2.5 Pengukuran Kinerja Sasaran dan IKU	38
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	
3.1 Evaluasi Capaian Kinerja	41
3.2 Analisis Pencapaian Sasaran.....	43
3.3 Akuntabilitas Keuangan	61
3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	69
Bab IV. Penutup	
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan	72
4.2 Permasalahan dan Kendala Utama Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja analisis Pencapaian Kinerja	74
4.3 Strategi dan Saran Pemecahan Masalah untuk Periode yang Akan Datang	75



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.....	4
Tabel 2.1 Program dan Kegiatan dalam RENJA INDUK dan RENJA PERUBAHAN TA 2023.....	19
Tabel 2.2 Capaian/Realisasi Keuangan Program dalam RENJA Tahun 2023	33
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2023 (Eselon 2)	34
Tabel 2.4 Skala Pengukuran Ordinal Dengan Petunjuk Pelaksanaan SAKIP.....	38
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih	39
Tabel 2.6 Capaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2022	40
Tabel 2.7 Capaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2023	40
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2023	42
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2023.....	44
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2023	51
Tabel 3.4 Analisis Pencapaian sasaran 1	52
Tabel 3.5 Tabel Penilaian SAKIP Tahun 2023 (untuk tahun 2022)	53
Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran 2	53
Tabel 3.7 Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Prabumulih Tahun 2023	54
Tabel 3.8 Analisis Pencapaian sasaran 3.....	56
Tabel 3.9 Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kota Prabumulih berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional tahun 2023	57
Tabel 3.10 Analisis Pencapaian Sasaran 4	58
Tabel 3.11 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kota Sampai Dengan Tahun 2023	60
Tabel 3.12 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih sampai dengan 31 Desember 2023	61
Tabel 3.13 Realisasi keuangan Dinas Ketahanan Pangan tahun 2023	62
Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Penggunaan Anggaran dengan Realisasi Capaian Target Kinerja tahun 2023.....	69
Tabel 3.15 Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	70



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.	5
Gambar 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih	35
Gambar 3.1 Grafik Fluktuasi Harga Beras Sepanjang Tahun 2023	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kota Prabumulih, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi sampai dengan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan



nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Melalui Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih dibentuk Dinas Ketahanan Pangan kota Prabumulih. Pengelolaan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih pada awalnya dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BPPPPKKP) yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015. Sejalan dengan pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih, Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih mempunyai tugas di Bidang Ketahanan Pangan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mengacu kepada payung hukum diatas maka dikeluarkan Peraturan Walikota Kota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah kota Prabumulih, maka kewenangan pengelolaan Ketahanan Pangan diserahkan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih. Berikut ini Dasar Hukum pembentukan OPD dan Daftar Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.



a. Dasar Hukum

Dasar Hukum Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih adalah sebagai berikut:

No	DASAR HUKUM
1.	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih
2.	Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih.

b. Daftar Pegawai

Daftar Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih adalah sebagai berikut:



Tabel 1.1
Daftar Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat/Gol./Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2023

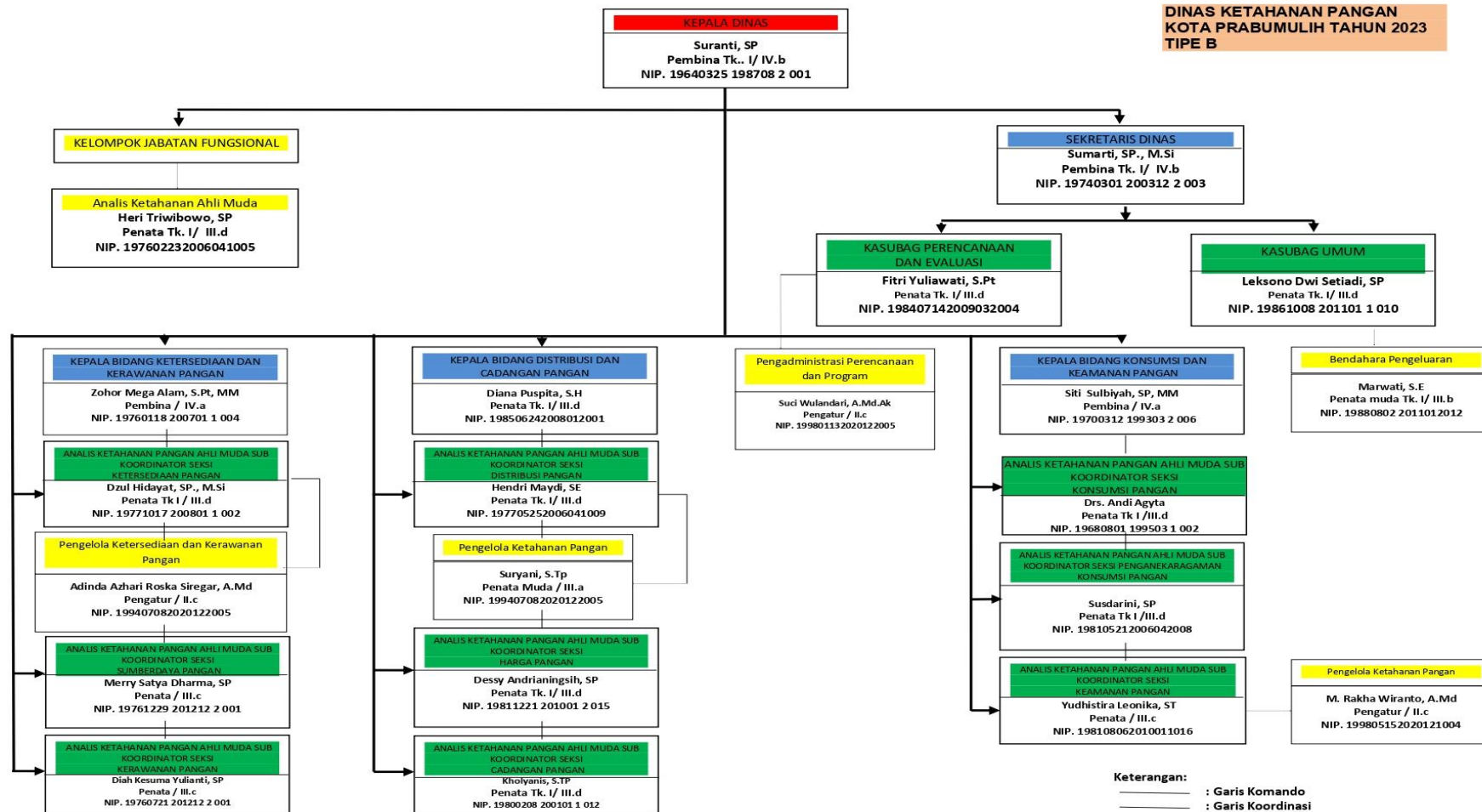
JUMLAH PEGAWAI		KUALIFIKASI PENDIDIKAN		PANGKAT/GOL		JUMLAH PEJABAT			
						STRUKTURAL		FUNGSIONAL	
Uraian	Jumlah (orang)	Uraian	Jumlah (orang)	Uraian	Jumlah (orang)	Uraian	Jumlah (orang)	Uraian	Jumlah (orang)
PNS	22	S3	-	IV.d	-	Ess. IV	1	Analisis Ketahanan Pangan Sub Koordinasi Seksi Ketersediaan Pangan	1
NON PNS	5	S2	4	IV.c	-	Ess. III	4	Analisis Ketahanan Pangan Sub Koordinasi Seksi Konsumsi Pangan	1
		S1	17	IV.b	2	Ess. II	1	Analisis Ketahanan Pangan Sub Koordinasi Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	1
		D4	-	IV.a	3			Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	1
		D3	5	III.d	9			Perencana Ahli Muda	1
		D2	-	III.c	3			Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Harga Pangan	1
		D1	-	III.b	1			Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Cadangan Pangan	1
		SLTA	1	III.a	1			Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Distribusi Pangan	1
				II.d	-			Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Kerawanan Pangan	1
				II.c	3			Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Sumber Daya Pangan	1
				II.b	-			Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Keamanan Pangan	1
				II.a	-			Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	0
Jumlah	27	Jumlah	27	Jumlah	22	Jumlah	6	Jumlah	11



c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih mengacu Perda Kota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 Tanggal 13 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih





d. Tugas dan Fungsi

Sejak awal tahun anggaran 2008 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BPPPPKKP) yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun mulai menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang ketahanan pangan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih menjadi unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dbidang ketahanan pangan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/ 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dan Peraturan Walikota Prabumulih nomor 43 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih. Mengacu kepada Perwako diatas Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih mempunyai fungsi:

1. KEPALA DINAS

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas: membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Dekonsentrasi dan Pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;



- c. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Walikota

2. SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - f. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



3. BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung dan ketahanan pangan lainnya;
 - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



4. BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyiapan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - b. Pelaksanaan penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - c. Pelaksanaan penyiapan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - d. Pelaksanaan pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - e. Pelaksanaan penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

5. BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan tentang konsumsi dan keamanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;



- b. Pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di Bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program dan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan pemanatauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum
 2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi :
 1. Seksi Ketersediaan Pangan
 2. Seksi Sumberdaya Pangan
 3. Seksi Kerawanan Pangan
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi :
 1. Seksi Distribusi Pangan
 2. Seksi Harga Pangan
 3. Seksi Cadangan Pangan
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
 1. Seksi Konsumsi Pangan
 2. Seksi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan
 3. Seksi Keamanan Pangan



6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Belum dibentuk di Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih

1.3 ISU STRATEGIS

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Kota Prabumulih, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola.

Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian :

1. Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada sumberdaya pangan lokal
3. Peningkatan mutu dan keamanan pangan
4. Penyediaan peta rentan pangan dan tahan pangan (FSVA) serta dukungan kepada masyarakat rawan pangan

LKJIP Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi
7. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2018 - 2023.

1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang Gambaran Umum Organisasi , Isu Strategis yang dihadapi OPD, dan Sistematika Pelaporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja, IKU dan Pengukuran Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Organisasi
 - a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
 - b. Membandingkan Realisasi antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (Min 3 Tahun sebelumnya)



- c. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan hari ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi
 - d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Jika Ada)
 - e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 - f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - g. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
2. Realisasi Anggaran
- a. Menjelaskan Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
 - b. Persentase (%) dari Capaian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan kinerja

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kerja
4. Pencapaian Kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2013-2018 yang telah disusun bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap semua program pembangunan yang dilakukan pemerintah, RPJMD ini merupakan acuan dan sekaligus koordinasi dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun mendatang, serta nantinya digunakan sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Walikota Kota Prabumulih selama periode pemerintahan 2013-2018.

Dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih, Peraturan Walikota Kota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016. Maka perlu disesuaikan kembali penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih karena urusan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dikembalikan menjadi bagian dari Dinas Pertanian Kota Prabumulih.

Kebijakan umum Pemerintah Kota Prabumulih dalam pembangunan ketahanan pangan adalah untuk mengatasi tantangan dan masalah yang menghambat proses dan kinerja sub sistem ketahanan pangan serta mendayagunakan peluang yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kecukupan pangan bagi setiap penduduk.

Kebijakan jangka pendek diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kerawanan pangan *transient* (mendadak) serta kerawanan kronis. Dalam hal kerawanan *transient*, kebijakan diarahkan untuk mengatasi situasi yang bersifat darurat sedangkan dalam hal kerawanan



kronis, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah ketahanan pangannya.

Kebijakan jangka menengah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan bagi seluruh penduduknya secara berkelanjutan. Disamping itu, untuk mengantisipasi memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat, kebijakan jangka menengah juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan daerah, mendorong proses penganekaragaman/diversifikasi pangan serta meningkatkan jaminan bagi setiap penduduk untuk memperoleh pangan yang cukup.

Arah kebijakan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih yaitu:

1. Meningkatkan kemudahan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan.
2. Memenuhi kuantitas dan kualitas konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal Berbasis sumberdaya lokal.
3. Mengurangi jumlah penduduk rawan pangan.
4. Meningkatkan mutu dan keamanan pangan segar

Dinas Ketahanan Pangan sebagai salah satu instansi sektor publik mempunyai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023 yang berorientasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2018 - 2023 yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 - 2023 mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan, dimana kode nama dan kode program dan kegiatan disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan/ kendala (*thereats*) yang ada. Analisis terhadap unsur - unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi



serta strategi instansi pemerintah. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, maka dalam dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis pencapaian tujuan dan sasaran berupa program dan kegiatan.

VISI

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana pembangunan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Kota Prabumulih dengan segala keterbatasan dan kemampuan daerah yang dimiliki sangat yakin bisa mewujudkan Kota Prabumulih yang lebih baik sehingga 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah berkomitmen kepada:

***“Kota Prabumulih sebagai Kota Prima
dan Berkualitas 2023”***

MISI

Untuk memenuhi Visi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan menjabarkannya ke dalam Misi, yaitu :

1. Misi ke-1 dari RPJMD:
Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang Baik, Berkualitas dan berprestasi
2. Misi ke-4 dari RPJMD:
Pemberdayaan Masyarakat dengan menciptakan seluas-luasnya kesempatan kerja/berusaha, serta dengan memantapkan daya saing



usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif.

Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023 sebanyak 2 (Dua) sasaran strategis.

2.2 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Mengacu kepada tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan maka disusun Program dan Kegiatan untuk mencapai hal tersebut guna mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2023 induk terdiri dari 4 (empat) Program, 13 (Tiga Belas) kegiatan, dan 35 (Tiga Puluh Lima) sub kegiatan di dalamnya.

Pada Tahun Anggaran 2023, ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi.

- b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Kegiatan promosi dan Edukasi Produk Pangan Lokal melalui pameran kegiatan EXPO GSMP)

Kegiatan Promosi dan Edukasi Produk Pangan Lokal melalui Pameran Kegiatan EXPO Gerakan Sumsel Mandiri Pangan tidak dapat direalisasikan dikarenakan tidak adanya undangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel untuk melaksanakan kegiatan tersebut.



- c. Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Kegiatan pengadaan cadangan pangan tidak dapat direalisasikan karena kegiatan tersebut terdapat pada APBD Perubahan Tahun 2023 serta proses pencairannya berada pada pertengahan bulan November dimana menurut surat dari BULOG Kanwil Sumsel Babel tidak dapat melakukan pengadaan sebelum dilakukan penyaluran beras yang telah disimpan/dititipkan di BULOG. Sementara, penyaluran beras tersebut dilaksanakan pada awal bulan Desember tahun 2023, sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pengadaan cadangan pangan tidak mencukupi waktu dikarenakan telah mencapai batas waktu akhir anggaran tahun 2023.

Secara rinci anggaran perubahan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.1
Program dan Kegiatan Dalam Pagu Induk dan Pagu Pergeseran Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renja 2023			Pagu Anggaran 2023			Keterangan				
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Anggaran	Setelah Perubahan	Bertambah/B erkurang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2	09	01					3.459.579.780	3.599.320.099	131.740.319				
2	09	01	2.01				13.200.000	21.200.000	-				
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1.300.000	1.300.000	-	
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1.300.000	1.300.000	-	
2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1.300.000	1.300.000	-	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renja 2023			Pagu Anggaran 2023			Keterangan				
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Anggaran	Setelah Perubahan	Bertambah/B erkurang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	1.300.000	1.300.000	-	
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumla Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	-	8.000.000	8.000.000	-	
					Rincian:								
					Tersedianya Dokumen Maturitas SPIP		1 Laporan	1 Laporan	-	2.000.000	2.000.000	-	
					Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi		1 Laporan	1 Laporan	-	6.000.000	6.000.000	-	
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.887.926.780	2.893.362.099	5.435.319	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Pegawai	47 Orang/Bulan	47 Orang/Bulan	-	2.850.526.780	2.855.962.099	5.435.319	Penambahan TPP 4.000.000 dan Gaji 1.435.319
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	34.800.000	34.800.000	-	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renja 2023			Pagu Anggaran 2023			Keterangan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Anggaran	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	1.300.000	1.300.000	-	
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	1.300.000	1.300.000	-	
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah					13.200.000	7.200.000	(6.000.000)	
2.09.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	13.200.000	7.200.000	(6.000.000)	Berkurang dikarenakan Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barangseseuai dengan Perpres 33 tahun 2020



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renja 2023			Pagu Anggaran 2023			Keterangan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Anggaran	Setelah Perubahan	Bertambah/B erkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					23.000.000	23.000.000	-	
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	30 Paket	-	23.000.000	23.000.000	-	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					367.053.000	507.238.000	140.185.000	
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	4.083.000	4.083.000	-	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket		17.970.000	13.160.000	(4.810.000)	Berkurang karena volume rapat dikurangi
		Rincian							
		Tersedianya air minum galon untuk kebutuhan kantor	1 Jenis	1 Jenis	-	5.460.000	5.460.000	-	
		Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	3.714 Kotak	3522 Kotak	192 Kotak	12.510.000	7.700.000	(4.810.000)	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	15.000.000	12.745.000	(2.255.000)	Berkurang karena persediaan item cetak kwitansi masih melebihi target yang digunakan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renja 2023			Pagu Anggaran 2023			Keterangan				
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Anggaran	Setelah Perubahan	Bertambah/B erkurang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	10.000.000	7.250.000	(2.750.000)	Berkurang karena item koran prabumulih post sudah tidak produksi lagi
2	09	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12 Paket	20.000.000	20.000.000	-	
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	300.000.000	450.000.000	150.000.000	Penambahan anggaran untuk menanggulangi kekurangan dana koordinasi luar dan dalam daerah
					Rincian								
					Tersedianya Anggaran Untuk Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		400 OH	663 OH	263 OH	270.000.000	390.000.000	120.000.000	Penambahan anggaran untuk menanggulangi kekurangan dana koordinasi luar daerah
					Tersedianya Anggaran Untuk Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah		200 OH	200 OH	-	30.000.000	60.000.000	30.000.000	Penambahan anggaran untuk menanggulangi kekurangan dana koordinasi dalam daerah



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renja 2023			Pagu Anggaran 2023			Keterangan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Anggaran	Setelah Perubahan	Bertambah/B erkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					63.000.000	28.000.000	(35.000.000)	
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	-	28.000.000	28.000.000	-	
2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	35.000.000	-	(35.000.000)	Berkurang dikarenakan anggaran tidak mencukupi melaksanakan kegiatan tersebut
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.200.000	2.200.000	-	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	-	2.200.000	2.200.000	-	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					90.000.000	117.120.000	27.120.000	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	-	80.000.000	110.000.000	30.000.000	Penambahan anggaran untuk menanggulangi kekurangan dana pembelian BBM



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renja 2023			Pagu Anggaran 2023			Keterangan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Anggaran	Setelah Perubahan	Bertambah/B erkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	-	10.000.000	7.120.000	(2.880.000)	Berkurang karena estimasi kerusakan sedikit
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					775.000.000	1.113.000.000	338.000.000	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					215.000.000	403.000.000	188.000.000	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan	2 Laporan	-	30.000.000	30.000.000	-	
		Rincian:							
		Jumlah Media untuk mengekspos Data Informasi Harga Pangan Ke Sektor Publik	1 Media	1 Media	-	10.000.000	10.000.000	-	
		Jumlah Laporan NBM PPH Kota Prabumulih	1 Dokumen	1 Media	-	20.000.000	20.000.000	-	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renja 2023			Pagu Anggaran 2023			Keterangan				
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Anggaran	Setelah Perubahan	Bertambah/B erkurang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1 Laporan	-	50.000.000	50.000.000	-	
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	-	10.000.000	10.000.000	-	
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	3 Dokumen	3 Dokumen	-	40.000.000	40.000.000	-	
						Rincian:							
						Jumlah Laporan Harga Pangan Pokok 16 Komoditi	1 Dokumen	1 Dokumen	-	5.000.000	5.000.000	-	
						Jumlah Laporan Stok/Pasokan Pangan Kota Prabumulih	1 Dokumen	1 Dokumen	-	10.000.000	10.000.000	-	
						Terpantaunya Ketersediaan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan Pokok (Sidak Pasar)	11 Komoditi	11 Komoditi	-	25.000.000	25.000.000	-	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renja 2023			Pagu Anggaran 2023			Keterangan				
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Anggaran	Setelah Perubahan	Bertambah/B erkurang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	1 unit	1 unit	-	85.000.000	85.000.000	-	
2	09	03	2.01	7	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	150 Keluarga	150 Keluarga	-	188.000.000	188.000.000	- Penambahan anggaran sebesar Rp 92.000.000 untuk Kegiatan Pemberdayaan Pekarangan dengan Tanaman Obat Keluarga dikarenakan untuk pengenalan obat herbal di masyarakat - Penambahan anggaran sebesar Rp 96.000.000 untuk Kegiatan Pembinaan kepada Sumberdaya Keluarga dikarenakan untuk pengendalian inflasi pangan
					Rincian:								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renja 2023			Pagu Anggaran 2023			Keterangan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Anggaran	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga melalui Pemberdayaan Pekarangan dengan Tanaman Obat Keluarga	-	Keluarga	Keluarga	-	92.000.000	92.000.000	Penambahan anggaran dikarenakan untuk pengenalan obat herbal di masyarakat
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga melalui Pemberdayaan Pengembangan Tanaman Cabe di Lahan Pekarangan	-	Keluarga	Keluarga	-	96.000.000	96.000.000	Penambahan anggaran dikarenakan untuk pengendalian inflasi pangan
2	0 9	0 3	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				
							150.000.000	150.000.000	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renja 2023			Pagu Anggaran 2023			Keterangan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Anggaran	Setelah Perubahan	Bertambah/B erkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Ton Cadangan Pangan Pemerintah	8,2 ton	3,5 ton	(4,7 ton)	150.000.000	140.000.000	(10.000.000)	Pengadaan dikurangi menjadi sebesar 3,5 ton, sisa pagu dialihkan ke kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dikarenakan adanya penyesuaian harga beras dengan BULOG
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	-	9,484 ton	9,484 ton	-	10.000.000	10.000.000	Penambahan kegiatan dikarenakan adanya penyesuaian harga beras yang tersimpan di BULOG sebelum beras diambil untuk disalurkan
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					410.000.000	560.000.000	150.000.000	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	25.000.000	25.000.000	-	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renja 2023			Pagu Anggaran 2023			Keterangan				
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Anggaran	Setelah Perubahan	Bertambah/B erkurang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	385.000.000	535.000.000	150.000.000	- Penambahan anggaran Pemeliharaan Obor Pangan Lestari berupa tanaman hidroponik sebesar Rp 100.000.000 dikarenakan adanya permintaan dari 6 Sekolah untuk lahan pekarangan Sekolah - Penambahan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Promosi dan Edukasi Produk Pangan Lokal melalui Pameran Kegiatan EXPO GSMP sebesar Rp 50.000.000 dikarenakan belum dianggarkan pada DPA Induk
					Rincian:								
					Jumlah Kelompok yang mengikuti kegiatan Pemeliharaan Obor Pangan Lestari	2 Kelompok	3 Kelompok	1 Kelompok	20.000.000	120.000.000	100.000.000		Penambahan anggaran dikarenakan adanya permintaan dari 6 Sekolah untuk lahan pekarangan Sekolah



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renja 2023			Pagu Anggaran 2023			Keterangan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Anggaran	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Tim yang diikutsertakan untuk terlaksananya kegiatan Penilaian Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman	6 Tim	6 Tim	-	50.000.000	50.000.000	-	
		Jumlah Kelompok yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat melalui Pembinaan Kelompok Pangan Olahan UP2K	10 Kelompok	10 Kelompok	-	240.000.000	240.000.000	-	
		Jumlah Kelompok yang diikutsertakan untuk Penilaian Lomba Kelompok Pangan Olahan UP2K	6 Kelompok UP2K	6 Kelompok UP2K	-	75.000.000	75.000.000	-	
		Pemberdayaan Masyarakat melalui Promosi dan Edukasi Produk Pangan Lokal melalui Pameran Kegiatan EXPO GSMP	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	50.000.000	50.000.000	Penambahan anggaran dikarenakan untuk persiapan ada undangan untuk mengisi produk olahan pangan lokal di Pameran
2	094	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				20.000.000	20.000.000	-	
2	094	2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				20.000.000	20.000.000	-	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renja 2023			Pagu Anggaran 2023			Keterangan				
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Anggaran	Setelah Perubahan	Bertambah/B erkurang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	20.000.000	20.000.000	-	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					30.000.000	30.000.000	-	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000	30.000.000	-	
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	10.000.000	10.000.000	-	
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	20.000.000	20.000.000	-	
GRAND TOTAL										4.284.579.780	4.754.320.099	469.740.319	



Adapun dengan pertimbangan efisiensi dan penyesuaian program kegiatan TA 2023, capaian realisasi keuangan 4 (empat) Program yang dilaksanakan di Tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Capaian/Realisasi keuangan Program dalam RENJA Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.591.320.099	3.242.700.492	90,29%
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.113.000.000	886.651.353	79,66%
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	20.000.000	19.684.000	98,42%
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	30.000.000	29.675.000	98,92%

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2018-2023, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih
Tahun 2023 (Eselon 2)

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100 %
2	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	94 %
3	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	85 %
4	Tersedianya Informasi Stabilisasi Harga Pangan dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Cakupan Informasi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	100%
		Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 60 Ton dalam 5 (Lima) Tahun	13 Ton

Perjanjian Kinerja Eselon 2, Eselon 3 dan Eselon 4 Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah ditandatangani pada tanggal Januari 2023.

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional, setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas Program dan Kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dikuatkan dengan keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Nomor : 019 /Kpts/DKP/2023 tentang IKU Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.

Berikut ini IKU Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 (Eselon 2).



Gambar 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023
(Eselon 2)

Kota : Prabumulih
Perangkat Daerah : DINAS KETAHANAN PANGAN
Tugas : BIDANG KETAHANAN PANGAN
Fungsi :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan.

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Laporan Penyusunan Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan	<p>Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)</p> $= \frac{\text{Ketersediaan pangan /kap/hri}}{100} \times \text{kandungan kalori} \times \text{BDD}$ $= \frac{\text{Ketersediaan pangan/kap/hri}}{100} \times \text{kandungan protein} \times \text{BDD}$ <p>Skor PPH Ketersediaan Prosentase (%) AKG =</p> $= \frac{\text{Energi/Protein masing - masing komoditas}}{\text{Angka Kecukupan Gizi}} \times 100 \%$



No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Laporan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	<p>Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari)</p> $= \frac{\text{Konsumsi pangan /kap/hri}}{100} \times \text{kandungan kalori} \times \text{BDD}$ $= \frac{\text{Konsumsi pangan/kap/hri}}{100} \times \text{kandungan protein} \times \text{BDD}$ <p>Skor PPH Konsumsi Prosentase (%) AKG =</p> $= \frac{\text{Energi/Protein masing - masing komoditas}}{\text{Angka Kecukupan Gizi}} \times 100 \%$
3.	Tersedianya Informasi Stabilisasi Harga Pangan dan Cadangan Pangan	Cakupan Informasi Stabilitas Harga Pangan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Laporan Pemantauan dan Analisis Pasokan (Stok) /Harga Pangan Masyarakat	<p>Nilai capaian ketersediaan informasi Harga pangan (K)</p> $K = \frac{\sum_{i=1}^n K}{3}$ $K = \frac{\sum_{j=1}^3 \text{Realisasi (j)}}{\text{T arge (j)}} \times 100 \%$ <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ki = Ketersediaan informasi menurut i Dimana : i = 1= Harga i = Pasokan i = 3 = Akses Realisasi (j) = banyaknya informasi yg tersedia pengumpulannya menurut j



					<p>Dimana : j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi j = 3 = waktu</p> <p>c. Target (j) = sasaran banyaknya informasi yang akan dikumpulkan menurut j Dimana j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi, j = 3 = waktu</p> <p>Stabilitas Harga Pangan (SP) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :</p> $SP = \frac{\sum_{i=1}^n SP_i}{N}$ <p>Keterangan : K = { H Untuk Harga P Untuk Pasokan Shi = Stabilitas Harga Komoditas ke i Spi = Stabilitas Pasokan komoditas ke i I = 1,2,3....n n = Jumlah Komoditas</p>
		Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 60 Ton dalam 5 (Lima) Tahun	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Laporan Cadangan Pangan untuk Mengatasi Keadaan Darurat	$= \frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kota}}{60} \times 100\%$
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Dokumen Administrasi dan Keuangan	

2.5 PENGUKURAN KINERJA SASARAN DAN IKU

Pengukuran Kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menghasilkan barang dan jasa. Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 2.4
Skala Pengukuran Ordinal dengan Petunjuk Pelaksanaan SAKIP

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Red
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Green
> 100%	Melebihi Target	Blue

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan
Kota Prabumulih Tahun 2023

No	Kategori / Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Memuaskan	> 100	Brown
2	Sangat Baik	> 90	Blue
3	Baik	75.00 – 89.99	Green
4	Cukup	65.00 – 74.99	Orange
5	Kurang	50.00 – 64.99	Yellow
6	Sangat Kurang	0 – 49.99	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Nomor: 019/KPTS/DKP/2023 telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja (*outcomes*) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- b. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- c. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- d. Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator

Hasil Pengukuran kinerja 4 (empat) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator Sasaran Dinas ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.6
Capaian Sasaran
Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih
Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
1	2	3	4	5
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP	BB	BB	100%
	2. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%	100%	100%
2. Meningkatkan Ketersediaan Pangan yang Cukup	Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	93,5	94,8	101,4%
3. Meningkatkan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84 %	85,2%	101,43%
4. Tersedianya Informasi Stabilisasi Harga Pangan dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	1. Cakupan Informasi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	100%	100%	100%
	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 60 Ton dalam 5 (Lima) Tahun	13 Ton	0 Ton	0 %

Tabel 2.7
Capaian Sasaran
Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih
Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
1	2	3	4	5
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP	A	BB	79,77
	2. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%	100%	100%
2. Meningkatkan Ketersediaan Pangan yang Cukup	Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	94	94,03%	100,03%
3. Meningkatkan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	85%	93,1%	109,52%
4. Tersedianya Informasi Stabilisasi Harga Pangan dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	1. Cakupan Informasi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	100%	100%	100%
	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 60 Ton dalam 5 (Lima) Tahun	13 Ton	0 Ton	0 %



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan dimaksud memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota Prabumulih.

3.1 EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai OPD. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran



keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Awal tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas ketahanan Pangan Nomor: 019/ KPTS/DKP/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
					%
1	Nilai SAKIP	Predikat	A	BB	99,71
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	%	100	100	100
3	Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	94	94,03	100,03
4	Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	85	93,1	109,52
5	Cakupan Informasi Harga Pangan	%	100	100	100
6	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 60 Ton dalam 5 (Lima) Tahun	Ton	13	0	0
	Total Capaian				84,87

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 75.00-89.99 ditunjukkan pada: Cakupan informasi harga pangan, Capaian Nilai SAKIP untuk Tahun 2023 yaitu 100% (Nilai BB 79,77) dan Persentase Tindak lanjut Temuan hasil pengawasan dengan capaian kinerja > 90 atau sangat baik. Sedangkan untuk capaian angka PPH Ketersediaan 100,03 % dengan kategori memuaskan, dan PPH Konsumsi pangan sebesar 109,52% dengan kategori memuaskan. Capaian yang berada pada kategori sangat kurang yaitu pada indikator Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kota. Secara umum capaian



sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan untuk Tahun 2023 sebesar 84,87 %.

3.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 sebanyak 4 (empat) sasaran. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 (lima) pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, dari sebanyak 4 (empat) sasaran strategis dengan sebanyak 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota adalah sebagai berikut:



Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2023

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
0,089710648	DINAS KETAHANAN PANGAN								93,43	
2.9 2.9.11 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100,00		95,00	95	
2.9 2.9.11 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang tepat waktu				100		100	100	
2.9 2.9.11 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	2	100	2	100	100	



KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.9 2.9.11 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100		100	100	
2.9 2.9.11 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Pegawai	35	Orang/Bulan	35	100	35	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1	Laporan	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen BMD yang Disampaikan Tepat Waktu				100		100	100	
2.9 2.9.11 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi				100		90	90	
2.9 2.9.11 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30	Paket	30	100	27	90	90	
2.9 2.9.11 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi umum Perkantoran				100		100	100	



KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.9 2.9.11 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	2	100	2	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	Dokumen	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100		50	50	
2.9 2.9.11 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	3	100	3	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	100	0	0	0	Kegiatan tidak dapat direalisasikan dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi
2.9 2.9.11 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100		100	100	
2.9 2.9.11 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	100	1	100	100	



KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.9 2.9.11 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD				100		100	100	
2.9 2.9.11 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	Unit	19	100	19	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	10	100	10	100	100	
2.9 2.9.11 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kinerja Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				100,00		88,00	88	
2.9 2.9.11 3 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota				100		100	100	
2.9 2.9.11 3.2.01.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2	Laporan	2	100	2	100	100	
2.9 2.9.11 3.2.01.2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1	Laporan	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 3.2.01.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1	Laporan	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 3.2.01.4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	3	Dokumen	3	100	3	100	100	
2.9 2.9.11 3.2.01.5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	1	Unit	1	100	1	100	100	



KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.9 2.9.11 3.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	150	Keluarga	150	100	150	100	100	
2.9 2.9.11 3 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				100		50	50	
2.9 2.9.11 3.2.02.3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Ton Cadangan Pangan Pemerintah	9	Ton	9	100	0	0	0	Kegiatan pengadaan cadangan pangan tidak direalisasikan dikarenakan ada kegiatan penyaluran cadangan pangan yang terdapat pada APBD Perubahan Tahun 2023 serta proses pencairannya berada pada pertengahan bulan November dimana menurut surat dari BULOG Kanwil Sumsel Babel tidak dapat melakukan pengadaan sebelum dilakukan penyaluran beras yang telah disimpan/dititipkan di BULOG. Sementara, penyaluran beras tersebut dilaksanakan pada awal bulan Desember tahun 2023, sehingga waktu yang diperlukan untuk



KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
										melakukan proses pengadaan cadangan pangan tidak mencukupi waktu dikarenakan telah mencapai batas waktu akhir anggaran tahun 2023.
2.9 2.9.11 3.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	9	Ton	9	100	9	100	100	
2.9 2.9.11 3 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Meningkatnya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				100		90	90	
2.9 2.9.11 3.2.04.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	Dokumen	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 3.2.04.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5	Laporan	5	100	4	80	80	Kegiatan Promosi dan Edukasi Produk Pangan Lokal melalui Pameran Kegiatan EXPO Gerakan Sumsel Mandiri Pangan tidak dapat direalisasikan dikarenakan tidak adanya undangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel untuk melaksanakan kegiatan tersebut
2.9 2.9.11 4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya Program Penanganan Kerawanan Pangan				100,00		100,00	100	



KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.9 2.9.11 4 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				100		100	100	
2.9 2.9.11 4.2.01.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	Dokumen	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya Program Pengawasan Keamanan Pangan				100,00		100,00	100	
2.9 2.9.11 5 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				100		100	100	
2.9 2.9.11 5.2.01.3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 5.2.01.5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	100	1	100	100	



Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	33,33 %
2	Sesuai Target	33,33 %
3	Tidak Mencapai Target	33,33 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis terhadap capaian program dan kegiatan.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 (empat) sasaran dan sebanyak 6 (enam) indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan sasaran secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran ke-1

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah”

Pencapaian sasaran 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran 1

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun 2019	Realisasi 2019	Target Tahun 2020	Realisasi 2020	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Tahun 2022	Realisasi 2022	Tahun 2023	Realisasi 2023
1	Nilai SAKIP	Predikat	C	CC	C (100%)	B	B (100%)	BB	C (71,56%)	BB	BB (100%)	A	BB (99,71)
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	%	0	0	100 (100%)	100	100 (100%)	100	100 (100%)	100	100 (100%)	100	100 (100%)

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu : Nilai SAKIP dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 Capaian Nilai SAKIP Tahun 2023 (untuk tahun 2022) yaitu 99,71% (Nilai BB (79,77)). Capaian realisasi ini tidak mencapai dari target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja 2023 namun capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya dari nilai 73,6 menjadi 79,77.

Dari hasil evaluasi atas Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2022 tersebut diperoleh nilai sebesar 79,77 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 100,00 atau 79,77 dengan kategori sangat baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 3/ coordinator.

Adapaun tabel penilaian SAKIP yaitu:

Tabel 3.5
Tabel Penilaian SAKIP Tahun 2023 (untuk tahun 2022)

Komponen		Bobot	Nilai hasil evaluasi
a	Perencanaan Kinerja	30	24,08
b	Pengukuran Kinerja	30	27,07
c	Pelaporan Kinerja	15	13,00
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,63
TOTAL		100	79,77



Capaian kinerja nyata indikator 2 “Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan” adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini mencapai target di dalam perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pada tahun 2023 tidak terdapat temuan hasil pemeriksaan, hanya sekedar pembinaan berkas administrasi.

Sasaran ke-2

“Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup”

Pencapaian sasaran strategis 2 (dua) yaitu “Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup” dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 2

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2019	Realisasi 2019	Tahun 2020	Realisasi 2020	Tahun 2021	Realisasi 2021	Tahun 2022	Realisasi 2022	Tahun 2023	Realisasi 2023
1	Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	91%	92%	91.31% (98%)	92,50%	95,50% (103,2%)	93%	95,50 % (102,68%)	93,5%	94,8 % (101,4%)	94%	94,03% (100,03%)

Capaian kinerja "Persentase Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan" tahun 2023 adalah sebesar 94,03% dari target sebesar 94% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,03 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan, namun bila dibandingkan dengan realiasasi tahun 2022 capaian kinerjanya menurun dari 94,8% menjadi 94,03%.

Kondisi Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan di Prabumulih berdasarkan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.7

Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Prabumulih Tahun 2023

No	Kelompok Bahan Pangan	Energi	% AKE	Bobot	Skor Riil	Skor PPH	Skor Maks
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	Padi-padian	1.165,23	48,55	0,50	23,22	24,28	25,00
2.	Umbi-umbian	102,42	4,27	0,50	2,04	2,13	2,50
3.	Pangan Hewani	637,24	26,55	2,00	50,80	24,00	24,00
4.	Minyak dan Lemak	246,28	10,26	0,50	4,91	5,00	5,00
5.	Buah/Biji Berminyak	15,26	0,64	0,50	0,30	0,32	1,00
6.	Kacang-kacangan	78,31	3,26	2,00	6,24	6,53	10,00
7.	Gula	84,92	3,54	0,50	1,69	1,77	2,50
8.	Sayuran dan Buah	179,32	7,47	5,00	35,74	30,00	30,00
9.	Lain-lain	0,0	0,0	-	0	-	-
	Jumlah	2.508,98	104,54		130,61	94,03	100

Keterangan Tabel :

- c* : bersumber dari hasil penyusunan Neraca Bahan Makanan Tahun 2016
d : $c/2400 \times 100\%$
e : angka ketetapan
f : $d \times e$
g : Skor AKG dengan memperhatikan Skor Maks, jika Skor AKG lebih tinggi dari Skor Maks maka yang diambil adalah Skor Maks
h : angka ketetapan

Dari Tabel 3.6 diatas, terlihat bahwa skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan di Kota Prabumulih Tahun 2023 berdasarkan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah sebesar **94,03** yang mana mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni 94,80. Perhitungan skor ini menggunakan aplikasi baru berdasarkan konsumsi SUSENAS dan produksi pertanian sedangkan data impor-ekspor sudah berdasarkan perhitungan aplikasi NBM Tahun 2023. Dengan menggunakan skor mutu ideal PPH ketersediaan sebesar 100 maka dapat dikatakan bahwa kualitas pangan yang tersedia di Prabumulih belum memenuhi kaidah gizi yang beragam dan seimbang yang ideal. Hal ini disebabkan kontribusi energi dari masing-masing kelompok pangan masih ada yang kurang, mendekati bahkan ada yang telah melebihi normal ideal PPH ketersediaan. Adapun kelompok pangan yang kontribusinya angka ideal PPH yang direkomendasikan yakni berasal dari kelompok pangan hewani, yaitu pangan hewani, minyak dan lemak dan dari kelompok pangan nabati yaitu sayur-sayuran, sedangkan kelompok bahan pangan yang masih



dibawah angka ideal yang direkomendasikan terdiri dari kelompok buah/ biji berminyak, padi-padian, kelompok umbi-umbian, kelompok gula, Kacang Kacangan dan kelompok lain-lain.

Belum tercapainya keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat di Prabumulih ditunjukkan dari konsumsi kelompok buah/ biji berminyak, padi-padian, kelompok umbi-umbian, kelompok gula, Kacang Kacangan dan kelompok lain-lain yang masih rendah. Hal ini cenderung dipengaruhi oleh :

1. Masih rendahnya daya beli masyarakat karena pendapatan yang masih rendah
2. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pola pangan beragam bergizi seimbang dan aman.
3. Masih terbatasnya akses terhadap komoditas pangan
4. Sistem distribusi pangan yang belum efektif dan efisien
5. Produksi beberapa komoditas pangan yang masih rendah sehingga ketergantungan pasokan dari luar daerah sangat mempengaruhi harga komoditas pangan di pasaran.

Untuk meningkatkan kualitas pangan yang tersedia maka yang perlu dilakukan adalah meningkatkan keseimbangan ketersediaan energi untuk seluruh kelompok pangan melalui penambahan tingkat ketersediaan energi untuk seluruh kelompok pangan. Untuk mendukung pencapaian target skor mutu pangan tersebut, dibutuhkan ketersediaan komoditas pangan dengan jumlah dan komposisi yang memadai. Untuk dapat mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan pangan, perlu diketahui kemampuan produksi pangan Kota Prabumulih. Mengingat potensi Prabumulih di bidang pertanian masih cukup baik maka peningkatan produksi beberapa komoditas pangan seperti kelompok buah/biji berminyak, padi-padian, kelompok umbi-umbian, kelompok gula, Kacang Kacangan dan kelompok lain-lain perlu terus dipacu sehingga dapat mempercepat waktu pencapaian skor normal mutu pangan PPH sebesar 100.

Upaya perbaikan kualitas ketersediaan pangan ini harus ditempuh dengan pendekatan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Penyediaan pangan diutamakan melalui peningkatan produksi dalam daerah dengan jumlah dan komposisi yang sesuai dengan kebutuhan dan kesukaan konsumen.
2. Pengembangan sistem distribusi yang efisien dengan jangkauan wilayah pedesaan dan daerah terpencil sehingga harga di pasaran dapat ditekan.

3. Penciptaan mekanisme daya beli pasar yang mendukung terbentuknya harga yang terjangkau dan mampu memberikan insentif bagi produsen untuk menghasilkan produksi pangan.
4. Keterlibatan pemerintah dan swasta dalam teknologi pengolahan pangan lokal.
5. Pemberdayaan kelompok wanita melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dan pengembangan usaha pengolahan pangan.

Sasaran ke-3

“Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)”

Pencapaian sasaran strategis 3 (tiga) “Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)” dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2019	Realisasi 2019	Tahun 2020	Realisasi 2020	Tahun 2021	Realisasi 2021	Tahun 2022	Realisasi 2022	Tahun 2023	Realisasi 2023
1	Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	76,51%	78%	80%	80%	83,88%	83%	82,90%	84%	85,2%	85%	93,1%
					(102,56%)		(104,85%)		(99,88%)		(101,43%)		(109,52%)

Sasaran “Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman” dengan indikator yaitu: “Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi”. Capaian kinerja nyata indikator "Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi" tahun 2023 adalah sebesar 93,1% yang berarti melebihi dari target direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar 85% sehingga persentase capaian kinerja tahun 2023 adalah 109,52%.

Berikut tabel skor pola pangan harapan konsumsi pangan penduduk kota prabumulih berdasarkan data survey sosial ekonomi nasional tahun 2023 yaitu:

TABEL 3.9

**SKOR POLA PANGAN HARAPAN KONSUMSI PANGAN PENDUDUK KOTA PRABUMULIH
BERDASARKAN DATA SURVEY SOSIAL EKONOMI NASIONAL
Tahun 2023**

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	279,2	1.079	55,2	51,4	0,5	27,6	25,7	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	55,0	69	3,5	3,3	0,5	1,8	1,7	2,5	1,7
3	Pangan Hewani	143,9	278	14,2	13,2	2,0	28,5	26,5	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	25,2	227	11,6	10,8	0,5	5,8	5,4	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	0,6	3	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	1,0	0,1
6	Kacang-kacangan	16,5	58	3,0	2,8	2,0	6,0	5,6	10,0	5,6
7	Gula	21,2	77	4,0	3,7	0,5	2,0	1,8	2,5	1,8
8	Sayur dan Buah	217,9	128	6,6	6,1	5,0	32,9	30,6	30,0	30,0
9	Lain-lain	51,7	33	1,7	1,6	-	-	-	-	-
	Total		1.954	100,0	93,0		104,5	97,3	100,0	93,1

Keterangan : *) Angka Kecukupan Energi (AKE) : 2100 Kkal/Kap/Hari

Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, sekaligus melestarikan sumberdaya pangan dan pencapaian keberlanjutan ketahanan pangan dan kualitas lingkungan, pemilihan bahan makanan diharapkan dapat memenuhi tidak hanya kecukupan gizi (nutritional adequacy), tetapi sekaigus memenuhi keseimbangan gizi (nutritional balance) yang didukung cita rasa (palatability), kuantitas dan kemampuan daya beli(affortability). Untuk memilih beragam jenis pangan sesuai triguna makanan perlu disesuaikan dengan daya terima dan biaya yang tersedia untuk belanja pangan.

Berdasarkan data survey sosial ekonomi nasional tingkat kecukupan gizi konsumsi pangan penduduk Kota Prabumulih menunjukkan bahwa konsumsi energi per hari sebesar 1.954 kkal/kapita yang terdiri dari 9 (sembilan) kelompok pangan hal ini menunjukkan bahwa konsumsi energi penduduk Kota Prabumulih belum mencapai standar yang diharapkan, begitu juga dengan konsumsi protein penduduk Kota Prabumulih per hari sebesar 59,0 gram/kapita

Capaian skoring Angka PPH Konsumsi Pangan Kota Prabumulih masuk ke dalam kategori sangat baik dimana peningkatan skor diatas target capaian perjanjian kinerja. Keberhasilan ini diantaranya dipengaruhi oleh upaya edukasi ke masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman di Tahun 2023 yang cukup gencar dilaksanakan.

Terlebih dengan adanya *Memorandum Of Understanding (MOU)* yang dilakukan dengan Tim Penggerak PKK Kota Prabumulih ikut serta memberikan sumbangsih terhadap peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya pemenuhan konsumsi dengan penganekaragaman pangan dan gizi dari



pekarangan sendiri. Di tahun 2023 sendiri Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan pendampingan, sosialisasi, edukasi dan promosi diantaranya melalui kegiatan:

1. Penilaian Lomba B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman)
2. Penilaian Lomba Kreasi Pangan Olahan
3. Pembinaan Kelompok Pangan Olahan UP2K
4. Penilaian Lomba Kelompok Pangan Olahan UP2K

Sasaran ke-4

“Tersedianya Informasi Stabilisasi Harga dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah”

Pencapaian sasaran strategis 4 (empat) meliputi 2 (dua) indikator yaitu:

1. Cakupan Informasi Stabilitas Harga Pangan, dan
2. Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 60 Ton dalam 5 (Lima) Tahun,dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Pencapaian sasaran ke-4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 4

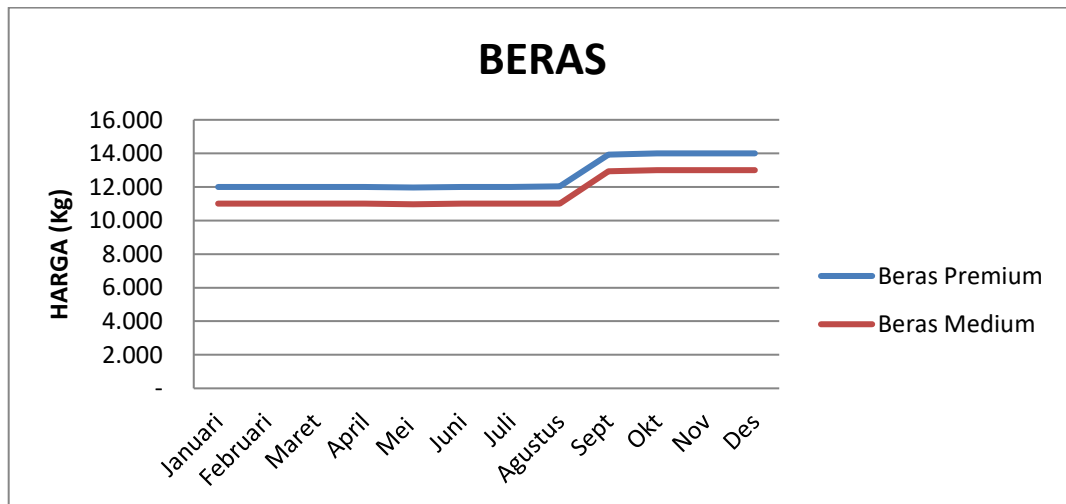
No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2019	Realisasi 2019	Tahun 2020	Realisasi 2020	Tahun 2021	Realisasi 2021	Tahun 2022	Realisasi 2022	Tahun 2023	Realisasi 2023
1	Cakupan Informasi Stabilitas Harga Pangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 60 Ton dalam 5 (Lima) Tahun	Ton	13,25	10	9,51 (95%)	13	9.484 (73%)	13	0 (0%)	13	0 (0%)	13	0 (0%)

Capaian kinerja nyata indikator: “Cakupan Informasi Stabilitas Harga Pangan” tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 %. Hasil Pemantauan Harga Pangan Pokok (Beras medium) selama 48 minggu selama tahun 2023 dengan koefisien keragaman *Coefisien Variabel* (CV) telah mencapai 8,39% dari target CV <10%. Angka ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga pangan utama yaitu beras masih dalam kategori stabil.

Harga Beras yang diambil yaitu beras medium bukan premium dikarenakan beras medium merupakan beras yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Angka ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga pangan utama yaitu beras masih dalam kategori tidak stabil. Pada umumnya fluktuasi/ lonjakan harga terjadi hanya bersifat sementara yaitu pada hari besar keagamaan dan nasional (HBKN) yaitu Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru. Kenaikan harga biasanya mulai terlihat ketika masyarakat menyambut datangnya bulan suci Ramadhan dan puncaknya menyambung Hari Raya Idul Fitri. Selain HBKN, fluktuasi harga yang terjadi tiap tahun karena adanya pergeseran nilai mata uang dimana harga beberapa komoditi pangan pokok tertentu dipengaruhi oleh perkembangan harga pasar internasional.

Jenis beras yang umumnya diminati masyarakat Kota Prabumulih yaitu beras medium dengan kualitas sedang seperti merk topi koki, rangkong dan sebagainya, sedangkan untuk merk beras premium yaitu beras raja. Perkembangan harga beras tahun 2023 di Kota Prabumulih tergambar pada grafik di bawah ini:

Gambar 3.1
Grafik Fluktuasi Harga beras sepanjang Tahun 2023



Perkembangan harga beras diatas terlihat bahwa harga beras pada awal tahun yaitu bulan januari sampai dengan agustus terlihat stabil, berada pada angka Rp.12.000,- untuk beras premium dan Rp. 11.000,- untuk beras medium. Harga beras terlihat naik pada bulan September januari sampai desember 2023. Pada bulan september sampai desember harga melonjak karena Hal ini terjadi karena harga gabah di tingkat petani yang meningkat serta berkurangnya hasil panen.

Sedangkan **Capaian kinerja indikator kedua yaitu “Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 60 Ton dalam 5 (Lima) Tahun”**



tahun 2023 adalah sebesar 0 Ton dari target sebesar 13 Ton yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 0%.

Kuota Minimum Cadangan Pangan Pemerintah Kota mengacu kepada kepada Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 257/1869/DKPP/2018 yaitu 71,39 Ton untuk Kota Prabumulih. Jumlah Total beras Cadangan Pangan sampai dengan saat ini yaitu sebanyak 48,669 Ton dan telah disalurkan sebanyak 36,405 Ton. Total Cadangan pangan sampai dengan tahun 2023 yang tersimpan di gudang BULOG yaitu 12,264 Ton (20,39%) dari Total Kuota Minimum Kota Prabumulih.

Kegiatan pengadaan cadangan pangan tidak direalisasikan dikarenakan ada kegiatan penyaluran cadangan pangan yang terdapat pada APBD Perubahan Tahun 2023 serta proses pencairannya berada pada pertengahan bulan November dimana menurut surat dari BULOG Kanwil Sumsel Babel Nomor : B-160.06020.03.2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang izin prinsip penjualan beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) tidak dapat melakukan pengadaan sebelum dilakukan penyaluran beras yang telah disimpan/dititipkan di BULOG. Sementara, penyaluran beras tersebut dilaksanakan pada awal bulan Desember tahun 2023, sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pengadaan cadangan pangan tidak mencukupi waktu dikarenakan telah mencapai batas waktu akhir anggaran tahun 2023.

Jumlah Cadangan Pangan (Beras) Pemerintah Kota sampai dengan tahun 2023 digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.11
Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah sampai dengan Tahun 2023

No	Tahun	Pengadaan (Kg)	Jumlah (Kg)	Penyaluran (Kg)	Total Jumlah (Kg)
1	2013	11.610	11.610	11.610	-
2	2014	5.055	5.055	4.815	240
		-	-	240	-
3	2015	4.550	4.550	4.550	4.550
4	2016	-	-	-	-
5	2017	4.575	4.575	4.575	-
6	2018	3.885	3.885	3.885	-
7	2019	9.510	9.510	6.730	2.780
8	2020	9.484	12.264	-	12.264
9	2021	-	12.264	-	12.264
10	2022	-	12.264	-	12.264
11	2023	-	12.264	-	12.264
Jumlah		48.669		36.405	12.264



Tahun 2023 adalah tahun ke 5 Pelaksanaan Renstra 2018-2023, capaian kinerja indikator Volume Cadangan Pangan Pemerintah tahun ini adalah sebesar 0 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Ketahanan Pangan maka capaian kinerjanya mencapai 20,39%.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama Tahun 2023 pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Prabumulih dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih dengan nilai adalah sebesar Rp. 4.754.320.099,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 4.178.710.845,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 87,89 %. Realisasi tersebut merupakan realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal pada TA 2023. Untuk Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer tidak ada anggaran dan realisasinya.

Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12

**Laporan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih
Sampai dengan 31 Desember Tahun 2023**

No. Urut	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Lebih/Kurang (Rp)
5	BELANJA DAERAH	4.754.320.099	4.178.710.845	87,97	571.609.254
5.1	BELANJA OPERASI	4.698.064.099	4.154.109.480	88,42	543.954.619
5.1.1	Belanja Pegawai	2.890.842.099	2.591.714.371	89,65	299.127.728
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.807.222.000	1.562.395.109	86,45	244.826.891
5.2	BELANJA MODAL	52.256.000	24.601.365	47,08	27.654.635
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.256.000	24.601.365	47,08	27.654.635
	SURPLUS / (DEFISIT)	4.754.320.099	4.178.710.845	87,97	571.609.254
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	4.754.320.099	4.178.710.845	87,97	571.609.254



Tabel 3.13
REALISASI KEUANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH TAHUN 2023

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Realisasi (Rp)	Persentase				
			Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)						
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
2	09	01				3.459.579.780		3.591.320.099	3.242.700.492	90,29%		
2	09	01	2.01			13.200.000		13.200.000	12.655.500	95,88%		
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.300.000	1 Dokumen	1.300.000	1.158.000	89,08%
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.300.000	1 Dokumen	1.300.000	1.175.500	90,42%
2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.300.000	1 Dokumen	1.300.000	1.197.000	92,08%
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.300.000	1 Dokumen	1.300.000	1.125.000	86,54%
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Maturitas SPIP	1 Dokumen	4.050.000	1 Dokumen	4.050.000	4.050.000	100,00%



Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Realisasi (Rp)	Persentase
							Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)		
						Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	3.950.000	1 Dokumen	3.950.000	3.950.000	100,00%
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.887.926.780		2.893.362.099	2.591.888.121	89,58%
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Pegawai	47 Orang/Bulan	2.850.526.780	47 Orang/Bulan	2.855.962.099	2.554.874.371	89,46%
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	34.800.000	1 Dokumen	34.800.000	34.800.000	100,00%
2	09	01	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.300.000	1 Dokumen	1.300.000	1.086.500	83,58%
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	1.300.000	1 Dokumen	1.300.000	1.127.250	86,71%
2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			13.200.000		7.200.000	7.200.000	100,00%
2	09	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13.200.000	1 Laporan	7.200.000	7.200.000	100,00%
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			23.000.000		23.000.000	21.030.000	91,43%
2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	23.000.000	30 Paket	23.000.000	21.030.000	91,43%
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			367.053.000		507.238.000	483.969.683	95,41%



Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Realisasi (Rp)	Persentase
							Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)		
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.083.000	1 Paket	4.083.000	3.362.000	82,34%
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	17.970.000	2 Paket	13.160.000	10.445.000	79,37%
						Rincian						
						Tersedianya air minum galon untuk kebutuhan kantor	1 Paket	5.460.000	1 Paket	5.460.000	7.750.000	
						Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	1 Paket	12.510.000	1 Paket	7.700.000	2.695.000	
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	1 paket	12.745.000	8.561.750	67,18%
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	7.250.000	6.900.000	95,17%
2	09	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	12.076.500	60,38%
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	450.000.000	442.624.433	98,36%
						Rincian						
						Tersedianya Anggaran Untuk Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	400 OH	270.000.000	663 OH	390.000.000	388.614.433	99,64%
						Tersedianya Anggaran Untuk Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	200 OH	30.000.000	200 OH	60.000.000	54.010.000	90,02%
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			63.000.000		28.000.000	26.246.365	93,74%



Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Realisasi (Rp)	Persentase
							Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)		
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	28.000.000	3 unit	28.000.000	26.246.365	93,74%
2	09	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	35.000.000	-	-	-	-
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.200.000		2.200.000	2.200.000	100,00%
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.200.000	1 Laporan	2.200.000	2.200.000	100,00%
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			90.000.000		117.120.000	97.510.823	83,26%
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	80.000.000	18 Unit	110.000.000	95.840.823	87,13%
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10.000.000	10 unit	7.120.000	1.670.000	23,46%
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			775.000.000		1.113.000.000	886.651.353	79,66%
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			215.000.000		403.000.000	319.502.900	79,28%
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	30.000.000	28.255.200	94,18%
						Rincian:						
						Jumlah Media untuk mengekspos Data Informasi Harga Pangan Ke Sektor Publik	1 Media	10.000.000	1 Media	10.000.000	8.319.200	83,19%



Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Realisasi (Rp)	Persentase
							Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)		
						Jumlah Laporan NBM PPH Kota Prabumulih	1 Dokumen	20.000.000	1 Media	20.000.000	19.936.000	99,68%
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	48.878.000	97,76%
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	9.854.000	98,54%
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	3 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	40.000.000	35.076.000	87,69%
						Rincian:						
						Jumlah Laporan Harga Pangan Pokok 16 Komoditi	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	4.955.000	99,10%
						Jumlah Laporan Stok/Pasokan Pangan Kota Prabumulih	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	9.084.000	90,84%
						Terpantaunya Ketersediaan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan Pokok (Sidak Pasar)	11 Komoditi	25.000.000	11 Komoditi	25.000.000	21.037.000	84,15%
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	1 unit	85.000.000	1 Unit	85.000.000	40.310.700	47,42%
2	09	03	2.01	7	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	-	150 KK	188.000.000	157.129.000	83,58%
						Rincian:						
						Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga melalui Pemberdayaan Pekarangan dengan Tanaman Obat Keluarga	-	-	75 KK	92.000.000	71.399.000	77,61%



Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Realisasi (Rp)	Persentase
							Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)		
						Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga melalui Pembinaan kepada Sumberdaya Keluarga	-	-	75 KK	96.000.000	85.730.000	89,30%
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			150.000.000		150.000.000	86.313.858	57,54%
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Ton Cadangan Pangan Pemerintah	8,2 ton	150.000.000	8,2 ton	140.000.000	78.540.702	56,10%
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota yang terpelihara		-		10.000.000	7.773.156	77,73%
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			410.000.000		560.000.000	480.834.595	85,86%
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	23.131.000	92,52%
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	385.000.000	5 Laporan	535.000.000	457.703.595	85,55%
						Rincian:						
						Jumlah Kelompok yang mengikuti kegiatan Pemeliharaan Obor Pangan Lestari	2 Kelompok	20.000.000	3 Kelompok	95.000.000	118.482.345	124,72%
						Jumlah Tim yang diikutsertakan untuk terlaksananya kegiatan Penilaian Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman	6 Tim	50.000.000	6 Tim	50.000.000	48.816.625	97,63%



Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Realisasi (Rp)	Persentase				
			Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)						
		Jumlah Kelompok yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat melalui Pembinaan Kelompok Pangan Olahan UP2K	10 Kelompok	240.000.000	10 Kelompok	240.000.000	226.563.000	94,40%				
		Jumlah Kelompok yang diikutsertakan untuk Penilaian Lomba Kelompok Pangan Olahan UP2K	6 Kelompok UP2K	75.000.000	6 Kelompok UP2K	75.000.000	63.841.625	85,12%				
		Pemberdayaan Masyarakat melalui Promosi dan Edukasi Produk Pangan Lokal melalui Pameran Kegiatan EXPO GSMP	-	-	1 Kegiatan	75.000.000	-	0,00%				
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			20.000.000	19.684.000	98,42%				
2	09	04	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			20.000.000	19.684.000	98,42%				
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	19.684.000	98,42%
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			30.000.000	29.675.000	98,92%				
2	09	05	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000	29.675.000	98,92%				
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	9.925.000	99,25%
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	19.750.000	98,75%
						4.284.579.780	4.754.320.099	4.178.710.845	87,89%			



Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Penggunaan Anggaran
dengan Realisasi Capaian Target Kinerja
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	NILAI SAKIP	A	BB	99,71%	Rp 13.200.000	Rp 12.655.500	95,88%
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100	100	100%	Rp 3.578.120.099	Rp 3.230.044.992	90,27%
2	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang cukup	Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	94	94,03	100,03%	Rp 348.000.000	Rp 267.180.700	76,78%
3	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	85	93,1	109,53%	Rp 590.000.000	Rp 510.509.595	86,53%
4	Tersedianya Informasi Stabilisasi Harga Pangan dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Cakupan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100	100	100%	Rp 75.000.000	Rp 72.006.200	96,01%
		Jumlah cadangan pangan beras pemerintah dalam (ton) Minimal 60 Ton dalam 5 (lima) Tahun	Ton	13	0%	Rp 150.000.000	Rp 86.313.858	57,54%
Total					84,88%	Rp 4.754.320.099	Rp 4.178.710.845	Rp 87,89

3.4 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, bahwa semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Kriteria efisiensi mengacu Kepmendagri tersebut bahwa rasio efisiensi: a) jika > 100,00 persen berarti “tidak efisien”; b) 90,00 - 100,00 persen berarti “kurang efisien”; c) 80,00– 90,00 persen berarti “cukup efisien”; d) 60,00 – 80,00 persen berarti “efisien”; e) dan jika < 60,00 persen berarti “sangat efisien”.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan cara membandingkan persentase capaian kinerja terhadap persentase capaian atau penyerapan anggaran

Tabel 3.15
Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	NILAI SAKIP	99,71%	95,88%	3,83%
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%	90,27%	9,73%
2	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang cukup	Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	100,03%	76,78%	23,25%
3	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	109,53%	86,53%	23,00%
4	Tersedianya Informasi Stabilisasi Harga Pangan dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Cakupan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100%	96,01%	3,99%
		Jumlah cadangan pangan beras pemerintah dalam (ton) Minimal 60 Ton dalam 5 (lima) Tahun	0%	57,54%	-57,54%
Total			509,27%	503,01%	6,26%

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa untuk sasaran strategis tersedianya informasi Stabilisasi Harga pangan dan cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan indikator utama jumlah cadangan pangan beras pemerintah dalam (ton) Minimal 60 Ton dalam 5 (Lima) Tahun bahwa persentase anggaran lebih besar dari capaian kinerja yang berarti kurang efisien, hal ini dikarenakan kegiatan pengadaan cadangan pangan tidak dapat direalisasikan.

Kegiatan pengadaan cadangan pangan tidak direalisasikan dikarenakan ada kegiatan penyaluran cadangan pangan yang terdapat pada APBD Perubahan Tahun 2023 serta proses pencairannya berada pada pertengahan bulan November dimana menurut surat dari BULOG Kanwil Sumsel Babel Nomor : B-160.06020.03.2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang izin prinsip penjualan beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) tidak dapat melakukan pengadaan sebelum dilakukan penyaluran beras yang telah disimpan/dititipkan di BULOG. Sementara, penyaluran beras tersebut dilaksanakan pada awal bulan Desember tahun 2023, sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pengadaan cadangan pangan tidak mencukupi waktu dikarenakan telah mencapai batas waktu akhir anggaran tahun 2023.



Dalam laporan ini, Pemerintah Kota Prabumulih dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2018-2023 maupun RKPD Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2018-2023 berdasarkan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2019.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Dalam laporan ini, Pemerintah Kota Prabumulih dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2018-2023 maupun RKPD Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Walikota Prabumulih. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2018-2023 berdasarkan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor : 1 Tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023



sebesar Rp. 4.754.320.099,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 4.178.710.845,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 87,89 % Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih kondisi anggaran adalah Silpa **Rp 571.609.254**.

Dalam tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- o Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100 %
- o Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,03%
- o Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 109,52 %
- o Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 50 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 (empat) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Rata-rata Capaian Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan tahun 2023 sebesar **84,87%**.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih telah digunakan anggaran sebesar Rp. 4.750.320.099 (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) guna mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Wali Kota Prabumulih.

Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih adalah **87,89%** yaitu Rp 4.178.710.845 (Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dari anggaran yang direncanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Prabumulih.

4.2 PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA

Terkait Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan kota Prabumulih, ada beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih antara lain:

- a. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat Kota Prabumulih tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan Aman (B2SA) sesuai dengan pola pangan harapan untuk menunjang hidup sehat dan produktif. Pola Konsumsi masyarakat sebagian besar kepada kuantitas (kenyang) dan bukan kepada kualitas (gizi) sehingga konsumsi masyarakat masih bertumpu pada beras dan terigu.
- b. Kuota Minimum Cadangan Pangan Pemerintah Kota mengacu kepada kepada Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 257/1869/DKPP/2018 yaitu 71,39 Ton untuk Kota Prabumulih. Jumlah Total beras Cadangan Pangan sampai dengan saat ini yaitu sebanyak 48,669 Ton dan telah disalurkan sebanyak 36,405 Ton. Total Cadangan pangan sampai dengan tahun 2023 yang tersimpan di gudang BULOG yaitu 12,264 Ton (20,39%) dari Total Kuota Minimum Kota Prabumulih.

Kegiatan pengadaan cadangan pangan tidak direalisasikan dikarenakan ada kegiatan penyaluran cadangan pangan yang terdapat pada APBD Perubahan Tahun 2023 serta proses pencairannya berada pada pertengahan bulan November dimana menurut surat dari BULOG Kanwil Sumsel Babel Nomor : B-160.06020.03.2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang izin prinsip penjualan beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) tidak dapat melakukan pengadaan sebelum dilakukan penyaluran beras yang telah disimpan/dititipkan di BULOG. Sementara, penyaluran beras tersebut dilaksanakan pada awal bulan Desember tahun 2023, sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pengadaan cadangan pangan tidak mencukupi waktu dikarenakan telah mencapai batas waktu akhir anggaran tahun 2023.

- c. Harga pangan pokok yang dipantau sepanjang tahun berada dalam kondisi cukup stabil dan hanya berfluktuasi rendah menjelang Hari Besar keagamaan Nasional (HBKN).
- d. Pelaksanaan Pemetaan Masyarakat Rentan Pangan dan Tahan Pangan masih belum menjangkau keseluruhan Kecamatan di Kota Prabumulih.



- e. Pengawasan standar mutu keamanan pangan segar di Kota Prabumulih belum optimal. Terlebih lokasi Kota Prabumulih yang strategis sehingga mobilitas barang masuk dan keluar cukup tinggi membutuhkan pengawasan yang lebih intens.
- f. Selanjutnya adalah Sistem informasi dan data ketahanan pangan belum optimal karena masalah keterbatasan SDM, sarana prasarana dan keterbatasan anggaran.
- g. Belum berkembangnya teknologi dan industri pangan berbasis sumber daya pangan lokal dan produk pangan alternatif berbasis sumber daya pangan local.

4.3 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH DAN SARAN UNTUK PERIODE YANG AKAN DATANG

- a. Meningkatkan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan promosi tentang pola Konsumsi pangan beragam, bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) kepada masyarakat dan Diversifikasi Pangan dan Gizi masyarakat terutama kepada produk non beras dan terigu;
- b. Penambahan kuota Cadangan pangan pemerintah Kota untuk memenuhi kuota minimum Kota Prabumulih Tahun 2024 mengacu kepada Perhitungan CPPD berdasarkan Perbadan RI No. 15 Tahun 2023 dimana Pengadaan CPPD Kota Prabumulih minimal 7,8 ton pertahun.
- c. Upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan segar menjelang HBKN ditujukan untuk ringankan beban masyarakat melalui operasi pasar produk pangan segar seperti Cabai, Bawang, Telur dan Ayam.
- d. Peningkatan pagu untuk menjangkau seluruh kelompok sasaran pemetaan yang belum dilaksanakan di tahun 2023.
- e. Dirasakan sangat penting untuk peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar, Registrasi, Rekomendasi dan Sertifikasi produk pangan segar di Tahun Anggaran selanjutnya.
- f. Perlu peningkatan akses terhadap data dan informasi pangan kepada sektor publik melalui aplikasi berbasis online yang didukung oleh Sumber Daya Manusia serta sarana/prasarana pendukung lainnya seperti kendaraan dinas serta perangkat lunak.
- g. Revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan pangan dan fungsi kelembagaan pangan seperti kelompok tani, UKM, koperasi untuk



mendukung pembangunan kemandirian pangan. Kemitraan antar lembaga perlu didorong untuk menumbuhkan usaha dalam bidang pangan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Kota Prabumulih ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Prabumulih.